

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Nama Unit Organisasi : **Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur**
2. Tugas : Membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tatalaksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
3. Fungsi :
  1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.
  2. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah.
  3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah.
  4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah.
  5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah.
  6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Kualitas LPPD	1 Predikat LPPD	Predikat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil Evaluasi LPPD dijadikan dasar untuk melakukan pembinaan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi</li> <li>- Memotivasi daerah lebih meningkatkan kinerja dalam kapasitas sebagai pelayan publik</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan pemerintahan Daerah</li> <li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan</li> </ul>	3<ST<4=Sangat Tinggi, 2<T<3=Tinggi, 1<S<2=Sedang, 0<R<1=Rendah	Biro pemerintahan dan Perbatasan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
2.	Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional	2 Presentase administrasi kependudukan kab/kota yang memenuhi kategori lebih dari atau sama dengan " Baik"	Persentase	Meningkatkan motivasi penyelenggaraan kependudukan kab/kota dalam rangka tertib administrasi kependudukan	1. Quisioner ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil kab/kota  2. Monitoring ke lapangan	Pembobotan penilaian :  1 Rumusan penghitungan kriteria utama (75%) : Bobot = 75% nilai masing-masing variabel 40 - 100 Nilai x bobot = nilai akhir  2 Rumusan penghitungan kriteria penunjang : Bobot = 25% nilai masing-masing variabel 40 - 100 nilai x bobot = nilai akhir  3 Kategori 80 keatas = Sangat Baik 70 - 80 = Baik 61 - 70 = Sedang 50 - 60 = kurang	
3.	Terwujudnya produk hukum daerah yang sesuai dengan norma/azas HAM	3 Jumlah produk hukum yang ditetapkan	dokumen	Mengukur produk hukum yang dihasilkan tidak melanggar norma dan azas HAM sehingga dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan konflik dan keresahan dalam masyarakat.	Jumlah Produk Hukum yang telah ditetapkan dan didokumentasikan	$\frac{\text{Jumlah produk hukum yang masuk}}{\text{Jumlah produk hukum yang diselesaikan}} \times 100\%$	Biro Hukum
4.	Terwujudnya bantuan hukum,dan aparaturn/ masyarakat sadar hukum dalam penegakan HAM	4 Prosentase penyelesaian advokasi / Bantuan Hukum	Persentase	Mengukur gugatan sengketa yang terjadi antara Pemerintah dengan masyarakat/pihak lain yang masuk dalam ranah hukum serta Masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat berkaitan dengan HAM sehingga sering terjadi pelanggaran hukum yang berdampak pada masyarakat oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.	Laporan penyelesaian advokasi/bantuan hukum yang telah dilakukan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang masuk}} \times 100\%$	

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
5.	Meningkatnya kerjasama antar daerah	5 Jumlah perjanjian kerjasama (MOU)	MoU	Mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam pelayanan administrasi khususnya dalam pembuatan MoU dan surat izin perjalanan dinas ke luar negeri	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Himpunan Perjanjian Kerjasama	Jumlah Perjanjian kerjasama (MoU) yang terealisasi	Biro pemerintahan dan Perbatasan
6.	Meningkatnya kepastian batas wilayah antar kab/kota dan provinsi	6 Cakupan Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas	Persentase	Mengukur keberhasilan fasilitasi dan penyelesaian sengketa batas wilayah	RENSTRA BIRO 2013 - 2018 Katalog Tapal Batas	$\frac{\text{Batas Wilayah yang sudah memiliki Kesepakatan Batas}}{\text{Jumlah seluruh Batas Wilayah}} \times 100\%$	
7.	Terwujudnya pelayanan administrasi pengendalian pembangunan sesuai dengan rencana	7 Prosentase program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana	Persentase			$\frac{\text{program/ kegiatan yang strategis sesuai rencana}}{\text{Jumlah seluruh program/ kegiatan}} \times 100\%$	Biro Pembangunan Daerah
8.	Terwujudnya koordinasi bidang perekonomian	8 Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Ekonomi	Persentase				Biro Perekonomian
9.	Terwujudnya kualitas koordinasi bidang kesejahteraan rakyat	9 Persentase penurunan kebijakan yang tidak sinkron pada bidang Kesra	Persentase				Biro Kesejahteraan Rakyat
10.	Terwujudnya pelayanan humas dan protokol secara internal dan eksternal yang berkualitas	10 Prosentase berita positif pembangunan daerah	Persentase				Biro Humas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Alasan	Sumber Data	Cara Perhitungan	Penanggung Jawab
11.	Terwujudnya organisasi tatalaksana dan pendayagunaan aparatur yang profesional, rasional, efektif, efisien dan akuntabel	11 Skor SKM rata2 unit pelayanan	Skor	Mengukur kemampuan organisasi dalam memberikan layanan kepada masyarakat untuk menerapkan pelayanan publik yang baik	Laporan dari unit layanan	Survey IKM	Biro Organisasi
		12 Nilai Akuntabilitas Provinsi	Nilai	Mengukur keberhasilan penerapan SAKIP di Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Kementerian PAN dan RB	Sesuai dengan Bobot dari Hasil Laporan Evaluasi (LHE)	
12	Terwujudnya pelayanan pengelolaan administrasi umum	13 Skor SKM rata-rata Pelayanan Administrasi Umum, Kerumahtanggaan Setda, Keuangan Setda, Sarana Komunikasi dan Telekomunikasi	Skor				Biro Umum